

Nama : M Faridz Putra Sila

NPM : 2456041048

Kelas : Mandiri B

Perspektif Administrasi Negara Dalam Keberagaman SARA di Indonesia

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Pendekatan ini dipilih karena penelitian bertujuan untuk memahami secara mendalam fenomena sosial dan kebijakan publik yang berkaitan dengan bagaimana administrasi negara mengelola keberagaman Suku, Agama, Ras, dan Antar Golongan (SARA) di Indonesia. Pendekatan kualitatif memungkinkan peneliti menggali makna, pandangan, dan pengalaman dari pihak-pihak yang terlibat langsung dalam upaya menjaga harmoni sosial di tengah pluralitas bangsa.

Menurut Moleong (2017), penelitian kualitatif berfokus pada upaya memahami makna dari tindakan sosial berdasarkan perspektif pelaku, bukan pada angka atau pengujian hipotesis. Dengan demikian, pendekatan ini relevan digunakan untuk menelusuri bagaimana prinsip-prinsip administrasi negara diterapkan dalam konteks sosial yang majemuk, serta bagaimana birokrasi berperan sebagai mediator antara kebijakan dan masyarakat multikultural.

Jenis penelitian deskriptif kualitatif digunakan untuk memberikan gambaran faktual, sistematis, dan akurat mengenai situasi atau fenomena tertentu. Dalam konteks ini, penelitian bertujuan mendeskripsikan peran aparatur negara dalam mengelola kebijakan toleransi, upaya pencegahan konflik SARA, serta strategi membangun pemerintahan yang inklusif dan responsif terhadap keberagaman sosial.

Melalui pendekatan ini, diharapkan penelitian mampu menghasilkan pemahaman mendalam (in-depth understanding) terhadap praktik nyata administrasi publik dalam merespons isu

keberagaman di Indonesia, serta memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan teori dan praktik tata kelola pemerintahan yang berkeadilan sosial.

3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung, dengan lokasi utama di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kota Bandar Lampung serta beberapa komunitas dan organisasi masyarakat lintas agama yang aktif dalam forum kerukunan sosial. Kota ini dipilih karena mencerminkan keberagaman sosial dan budaya yang tinggi, di mana masyarakatnya terdiri dari berbagai etnis dan agama seperti Lampung, Jawa, Minang, Tionghoa, Muslim, Kristen, Hindu, dan Budha.

Kota Bandar Lampung memiliki pengalaman dalam membangun kerja sama lintas etnis dan keagamaan, serta dikenal memiliki Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) yang cukup aktif. Kondisi ini menjadikan lokasi penelitian sangat representatif untuk mempelajari bagaimana administrasi pemerintahan berperan menjaga integrasi sosial di tengah pluralitas masyarakat.

Waktu penelitian dilaksanakan selama tiga bulan, mulai September hingga November 2025. Prosesnya meliputi:

1. **Tahap persiapan:** pengumpulan literatur, perizinan penelitian, dan penyusunan pedoman wawancara.
2. **Tahap pengumpulan data:** wawancara mendalam, observasi lapangan, dan pengumpulan dokumen pendukung.
3. **Tahap analisis data:** reduksi, penyajian, serta penarikan kesimpulan berdasarkan temuan lapangan.
4. **Tahap penyusunan laporan akhir:** integrasi hasil analisis ke dalam bentuk narasi ilmiah yang sistematis.

3.3 Fokus dan Subjek Penelitian

Fokus Penelitian

Penelitian ini berfokus pada peran administrasi negara dalam pengelolaan keberagaman SARA di Indonesia dengan menitikberatkan pada tiga dimensi utama:

1. **Kebijakan publik** yang mencerminkan prinsip inklusivitas dan kesetaraan sosial.
2. **Strategi birokrasi** dalam mencegah dan menanggulangi konflik sosial berbasis SARA.
3. **Persepsi dan partisipasi masyarakat** terhadap peran pemerintah dalam menciptakan harmoni sosial dan toleransi.

Fokus ini membantu peneliti menggali pemahaman menyeluruh tentang bagaimana birokrasi berinteraksi dengan masyarakat dalam konteks keberagaman sosial dan bagaimana kebijakan dijalankan di tingkat daerah.

Subjek Penelitian

Subjek penelitian terdiri atas:

1. Aparatur Pemerintah Daerah, khususnya pejabat dan staf Kesbangpol Kota Bandar Lampung yang memiliki kewenangan dalam urusan kerukunan sosial dan pengawasan isu politik identitas.
2. Tokoh masyarakat dan pemuka agama, termasuk pengurus Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) dan perwakilan lembaga adat.
3. Warga masyarakat dari berbagai latar belakang etnis dan agama yang menjadi bagian dari komunitas sosial di Bandar Lampung.

Pemilihan subjek dilakukan dengan teknik purposive sampling, yaitu pemilihan informan berdasarkan kriteria tertentu yang relevan dengan fokus penelitian. Jumlah informan disesuaikan hingga mencapai titik jenuh data (data saturation), yaitu saat informasi yang diperoleh mulai berulang dan tidak ada temuan baru yang muncul.

3.4 Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan tiga teknik utama pengumpulan data, yaitu wawancara mendalam, observasi partisipatif, dan studi dokumentasi.

Pertama, wawancara mendalam dilakukan secara semi-terstruktur untuk menggali informasi secara mendalam mengenai pengalaman, pandangan, dan sikap informan terhadap kebijakan

dan praktik administrasi negara dalam menjaga keberagaman. Wawancara dilakukan di lokasi kerja atau tempat yang nyaman bagi informan, berlangsung antara 45–60 menit, dan direkam (dengan izin) untuk menjaga keakuratan data.

Kedua, observasi partisipatif dilakukan untuk mengamati langsung perilaku sosial, proses koordinasi antar lembaga, serta interaksi antara aparaturnya dengan masyarakat dalam kegiatan yang berkaitan dengan isu SARA, seperti rapat koordinasi lintas agama atau kegiatan sosial bersama.

Ketiga, studi dokumentasi dilakukan dengan menelaah berbagai dokumen resmi seperti laporan kegiatan Kesbangpol, laporan tahunan FKUB, berita acara koordinasi, serta data statistik dari Badan Pusat Statistik (BPS, 2023) dan Kementerian Dalam Negeri (2024) terkait dinamika keberagaman dan potensi konflik sosial. Dokumen-dokumen tersebut digunakan sebagai bahan triangulasi untuk memperkuat validitas temuan lapangan.

3.5 Teknik Analisis Data

Data dianalisis menggunakan *model analisis interaktif* Miles, Huberman, dan Saldaña (2014) yang mencakup tiga tahapan utama:

1. Reduksi Data (Data Reduction)

Tahap ini meliputi proses seleksi, pemfokusan, dan penyederhanaan data mentah hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi. Data yang relevan dengan peran birokrasi, kebijakan inklusif, dan strategi pencegahan konflik dipilih untuk dianalisis secara mendalam.

2. Penyajian Data (Data Display)

Data disajikan dalam bentuk narasi deskriptif, tabel, atau kutipan wawancara untuk menunjukkan pola dan hubungan antar temuan. Penyajian ini membantu peneliti melihat dinamika antara nilai-nilai administrasi negara dan realitas sosial masyarakat multikultural.

3. Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi (Conclusion Drawing/Verification)

Peneliti kemudian menarik makna dari pola dan tema yang muncul untuk menjawab fokus penelitian. Proses ini dilakukan secara terus-menerus bersamaan dengan verifikasi melalui

member checking dan triangulasi sumber agar kesimpulan yang dihasilkan benar-benar valid dan dapat dipertanggungjawabkan.

3.6 Uji Keabsahan Data

Keabsahan data dijaga melalui empat kriteria menurut *Lincoln dan Guba (1985)*, yaitu kredibilitas, transferabilitas, dependabilitas, dan konfirmabilitas.

- **Kredibilitas** dicapai melalui triangulasi sumber dan metode, serta konfirmasi hasil penelitian kepada informan untuk memastikan interpretasi peneliti sesuai dengan pandangan mereka.
- **Transferabilitas** dijaga dengan memberikan deskripsi konteks sosial dan administratif secara rinci agar hasil penelitian dapat diaplikasikan pada situasi yang serupa.
- **Dependabilitas** dipastikan melalui dokumentasi lengkap seluruh proses penelitian, termasuk perubahan teknik yang dilakukan di lapangan.
- **Konfirmabilitas** menjamin bahwa hasil penelitian benar-benar bersumber dari data, bukan dari bias atau opini pribadi peneliti.

3.7 Etika Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan dengan menjunjung tinggi prinsip etika penelitian sosial, yaitu menghormati martabat, hak, dan privasi informan. Sebelum pengumpulan data, peneliti memberikan penjelasan mengenai tujuan penelitian dan meminta persetujuan partisipasi (informed consent) dari setiap informan. Partisipasi dilakukan secara sukarela tanpa tekanan apa pun, dan informan berhak untuk menolak atau menghentikan partisipasi kapan pun.

Identitas informan dijaga kerahasiaannya dengan tidak mencantumkan nama asli maupun jabatan spesifik. Seluruh data hanya digunakan untuk kepentingan akademik. Peneliti juga menjaga netralitas dan objektivitas dalam menghadapi isu SARA yang sensitif, serta menghormati norma birokrasi dan jadwal kerja aparatur pemerintahan.

Etika penelitian ini menjadi dasar penting untuk menjaga kredibilitas hasil penelitian sekaligus memastikan tidak adanya dampak negatif terhadap individu atau lembaga yang terlibat dalam proses penelitian.

3.8 Instrumen Penelitian (Pedoman Wawancara)

Sebagai bagian dari metode pengumpulan data, peneliti menggunakan pedoman wawancara semi-terstruktur. Pedoman ini berfungsi sebagai panduan umum agar proses wawancara tetap fokus namun tetap memberi ruang bagi informan untuk menjelaskan secara bebas berdasarkan pengalaman dan pandangannya.

A. Pedoman Wawancara untuk Aparatur Pemerintah

1. Bagaimana pandangan Bapak/Ibu mengenai keberagaman SARA di Kota Bandar Lampung?
2. Apa peran pemerintah daerah dalam menjaga keharmonisan antar kelompok masyarakat?
3. Bagaimana bentuk kebijakan atau program yang diterapkan untuk mencegah konflik berbasis SARA?
4. Apa saja tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaan kebijakan tersebut?
5. Bagaimana koordinasi antara lembaga pemerintah dan organisasi masyarakat dalam menangani isu keberagaman?
6. Sejauh mana prinsip-prinsip administrasi negara seperti keadilan, transparansi, dan partisipasi diterapkan dalam kebijakan kerukunan sosial?

B. Pedoman Wawancara untuk Tokoh Agama dan Masyarakat

1. Bagaimana pandangan Bapak/Ibu tentang upaya pemerintah daerah dalam menjaga toleransi antar umat beragama?
2. Apakah sudah ada ruang komunikasi yang cukup antara pemerintah dan masyarakat dalam membahas isu keberagaman?
3. Apa bentuk partisipasi masyarakat dalam mendorong kebijakan yang inklusif?

4. Adakah contoh keberhasilan atau kegagalan kebijakan pemerintah dalam menangani perbedaan pandangan atau konflik sosial?
5. Bagaimana harapan masyarakat terhadap administrasi negara dalam mengelola pluralitas sosial ke depan?

C. Pedoman Wawancara untuk Warga Masyarakat

1. Bagaimana pengalaman Anda dalam berinteraksi dengan masyarakat yang berbeda suku, agama, atau budaya?
2. Apakah Anda merasa kebijakan pemerintah daerah sudah mencerminkan sikap adil dan menghargai keberagaman?
3. Pernahkah Anda menyaksikan atau mengalami gesekan sosial yang berkaitan dengan perbedaan identitas?
4. Bagaimana peran aparat pemerintah dalam merespons situasi tersebut?
5. Apa harapan Anda terhadap peran pemerintah dalam menjaga kerukunan dan kebersamaan masyarakat di masa depan?

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pusat Statistik. (2023). *Statistik kerukunan sosial Indonesia tahun 2023*. Jakarta: BPS RI.
- Bungin, B. (2019). *Penelitian kualitatif: Komunikasi, ekonomi, kebijakan publik, dan ilmu sosial lainnya*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Creswell, J. W. (2018). *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches* (5th ed.). Thousand Oaks, CA: Sage Publications.
- Handoyo, E. (2020). Administrasi publik dan penguatan nilai kebangsaan dalam masyarakat multikultural. *Jurnal Ilmu Administrasi Publik Indonesia*, 7(1), 35–48. =
- Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. (2024). *Laporan tahunan penyelenggaraan pemerintahan daerah 2024*. Jakarta: Kemendagri RI.
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2014). *Qualitative data analysis: A methods sourcebook* (3rd ed.). Thousand Oaks, CA: Sage Publications.
- Moleong, L. J. (2017). *Metodologi penelitian kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Nugraha, D. P., & Nurdiansyah, A. (2021). Tantangan administrasi publik dalam pengelolaan keragaman di Indonesia. *Jurnal Borneo Administrator*, 17(2), 155–170.
- Suwarno, Y. (2020). Kebijakan publik dan dinamika multikulturalisme di Indonesia. *Jurnal Administrasi Negara*, 14(1), 22–39.
- Thoha, M. (2020). *Birokrasi dan politik di Indonesia*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Wahyudi, D. (2021). Manajemen pemerintahan daerah dalam penguatan toleransi sosial. *Jurnal Kebijakan dan Manajemen Publik*, 9(2), 101–116.
- Wibowo, A. (2022). Peran forum kerukunan umat beragama dalam memperkuat integrasi sosial di daerah multikultural. *Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik UMA*, 10(1), 42–58